

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DI DESA  
PUTAK KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN  
MUARA ENIM TAHUN 2015**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Negara**



**Oleh :**

**Isdeli Pratama  
NIM. 07011281419202**

**Konsentrasi Administrasi Keuangan Publik**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
Indralaya, Ogan Ilir  
Agustus 2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBD<sub>Desa</sub>) DI DESA  
PUTAK KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN  
MUARA ENIM TAHUN 2015**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Negara**

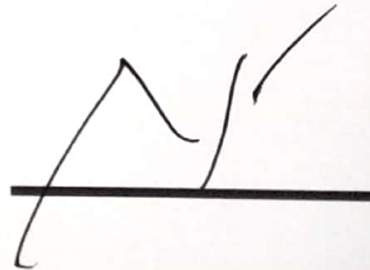
**Oleh :**

**Isdeli Pratama  
07011281419202**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Mei 2018**

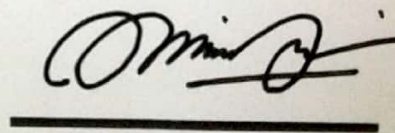
**Pembimbing I**

**Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, Msi  
NIP.196311061990031001**



**Pembimbing II**

**Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA  
NIP.198108272009121002**



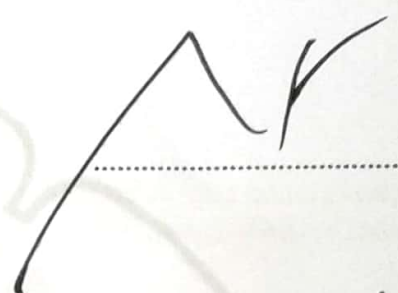
## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Putak Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Tahun 2015” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 06 Juni 2018.

Palembang, 06 Juni 2018

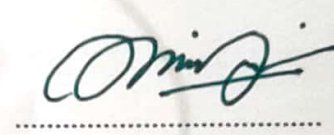
Ketua:

1. Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si  
NIP. 19631106 199003 1 001

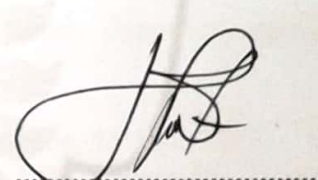


Anggota:

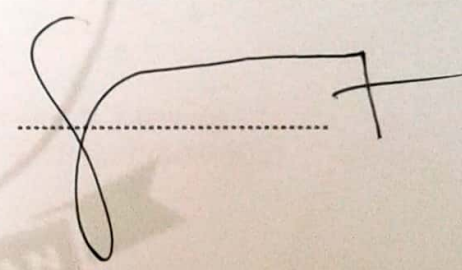
1. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA  
NIP. 19810827 200912 1 002



2. Hoiron Nisyak, S.Pd., M.Pd  
NIP. 19780302 200212 2 002



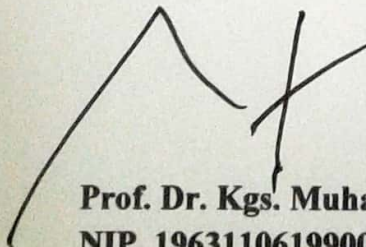
3. Drs. Gatot Budiarto, MS  
NIP. 19580609 198403 1 002



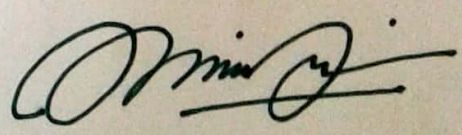
Mengetahui :

**Dekan FISIP**

**Ketua Jurusan Administrasi Negara**



**Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si**  
NIP. 196311061990031001



**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**  
NIP. 198108272009121002

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Teruslah berusaha dan berjuang sekuat tenaga sembari kau iringi dengan do’a, tapi ingatlah manusia hanya bisa berusaha dan berdo’a hanya Tuhanlah yang menentukan segalanya.”**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

Kedua Orang Tuaku Bapak Ismail dan Ibu Elita

Keluarga Besarku

Sahabat-sahabat terbaikku

Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunianya jualah skripsi ini dapat selesai. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi syarat menyelesaikan studi strata 1 (S1) jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan untuk menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama menjadi mahasiswa. Skripsi ini berisi penelitian tentang Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Putak Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim tahun 2015. Skripsi ini juga membahas tentang efektif atau tidaknya pengelolaan APBDesa di Desa Putak Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim tahun 2015 yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Putak.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tuaku dan segenap Keluarga besar yang telah banyak membantu baik bantuan berupa do'a, dukungan maupun finansial;
2. Bapak Prof. Dr. Kiagus M. Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan banyak masukan untuk pembuatan skripsi ini;
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos, M.P.A selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan pengarahan dalam pembuatan skripsi ini;
4. Ibu Ermanovida, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dalam hal pelayanan administrasi;
5. Ibu Dwi Mirani, S.IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang juga telah banyak membantu memberikan saran, masukan dan arahan untuk pembuatan skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan;
7. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dalam pelayanan administrasi;
8. Teman-teman Seperjuangan yang telah banyak memberikan suport dalam menyelesaikan skripsi ini;

Dengan penelitian dan penyusunan skripsi yang telah penulis lakukan, diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat memberikan banyak manfaat bagi pembaca terutama manfaat informasi dan/atau ilmu pengetahuan tentang pengelolaan APBDesa.

Indralaya, Juni 2018  
Penulis

Isdeli Pratama



## ABSTRAK

Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Putak Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan dan Pembagian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2015. Terdapat beberapa masalah yang terjadi di Desa Putak antara lain Desa Putak tidak memiliki kantor desa sebagai pusat pelayanan masyarakat desa, terlalu besarnya anggaran yang dihabiskan untuk perjalanan dinas aparatur desa dan tidak jelasnya beberapa aset desa yang dibeli melalui APBDesa Putak tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Putak Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori efektivitas organisasi dari Martani dan Lubis yaitu pendekatan sumber, pendekatan proses dan pendekatan sasaran. Hasil analisis dalam penelitian ini dapat dikatakan belum efektif karena masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan APBDesa Putak, antara lain kurangnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan APBDesa, kurangnya perencanaan pembangunan prasarana penunjang APBDesa dan kurang jelasnya beberapa aset desa yang dibeli melalui APBDesa Putak tahun 2015. Dengan Penelitian ini diharapkan agar kedepannya pengelolaan APBDesa dapat berjalan dengan baik, sehingga dampak dari pengelolaan APBDesa dapat dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat desa.

**Kata kunci : Efektivitas Pengelolaan Anggaran, Keuangan Desa, APBDesa**

**Pembimbing I**

  
**Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si**  
NIP.196311061990031001

**Pembimbing II**

  
**Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA**  
NIP.198108272009121002

**Indralaya, Juni 2018**  
**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Universitas Sriwijaya**

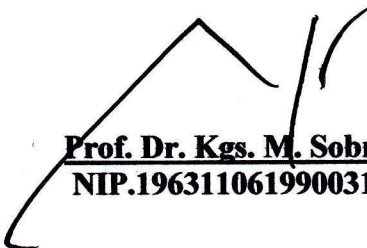
  
**Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA**  
NIP.198108272009121002

## **ABSTRACT**

*The effectiveness of the management of Revenue and Expenditure Budget Village (APBDesa) in Putak Village, Gelumbang Sub-district, Muara Enim Regency in 2015 is guided by several laws and regulations, such as Law Number 6 Year 2014 on Village, Regulation of the Minister of Home Affairs Number 113 year 2014 on Village Finance and Regulation of Muara Enim Regent Number 26 Year 2015 on Procedures for Determination and Distribution of Village Funds Each Village in Muara Enim District Budget Year 2015. There are several problems that occur in Putak Village, among others, Putak Village has no village office as village community service center, too much budget spent on the official apparatus of the village and unclear some of the village assets purchased through APBDesa Putak in 2015. This research aims to determine the effectiveness of the management of Revenue and Expenditure Budget Village (APBDesa) in Putak Village Gelumbang District Muara Enim District in 2015. This research uses qualitative research methods. Data collection techniques are in-depth interviews, observation and documentation. The theory used is organizational effectiveness theory from Martani and Lubis that is source approach, process approach and target approach. The results of the analysis in this research can be said not effective because there are still some problems that occur in the management of APBDesa Putak, among others, lack of facilities and infrastructure supporting the management of APBDesa, lack of planning infrastructure development support APBDesa and less clear some village assets purchased through APBDesa Putak 2015. With this research is expected to the future management of APBDesa can run well, so that the impact management of APBDesa can be felt by every layer of village community.*

**Keywords :** *Effectiveness of Budget Management, Village Finance, APBDesa*

**Advisor I**



**Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si**  
NIP.196311061990031001

**Advisor II**



**Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA**  
NIP.198108272009121002

**Indralaya, June 2018**  
**Chairman of the Department of Public Administration**  
**Faculty of Social and Political Sciences**  
**University of Sriwijaya**



**Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA**  
NIP.198108272009121002

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN</b> .....	<b>xiv</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis.....	10
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori.....	11
1. Keuangan Negara.....	11
2. Pengelolaan Keuangan Desa.....	12
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).....	14
4. Efektivitas.....	16
B. Teori Efektivitas.....	17
1. Teori Efektivitas Menurut Sondang P. Siagian.....	17
2. Teori Efektivitas Menurut Richard M. Steers.....	18
3. Teori Efektivitas Menurut Martani dan Lubis.....	18
4. Teori Efektivitas Menurut Duncan.....	18
C. Teori Yang Digunakan.....	19



D. Alasan Penggunaan Teori.....	19
E. Kerangka Pemikiran .....	20

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	22
B. Definisi Konsep .....	22
C. Fokus Penelitian .....	23
D. Data dan Sumber Data .....	24
1. Data.....	24
2. Sumber Data .....	24
E. Informan .....	25
F. Teknik Keabsahan Data.....	25
G. Teknik Pengumpulan Data .....	25
1. Wawancara Mendalam .....	25
2. Observasi .....	26
3. Dokumentasi .....	26
H. Instrumen Penelitian .....	26
I. Teknik Analisis Data .....	27

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	28
1. Keadaan Umum Desa Putak .....	28
2. Visi dan Misi Desa Putak .....	31
a. Visi .....	31
b. Misi.....	31
3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Putak .....	31
4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa Putak .....	32
a. Kepala Desa.....	32
b. Sekretaris Desa .....	33
c. Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha .....	35
d. Kepala Urusan Keuangan.....	36
e. Kepala Urusan Perencanaan.....	36
f. Bendahara Desa.....	37
g. Kepala Seksi Pemerintahan .....	38
h. Kepala Seksi Kesejahteraan .....	38
i. Kepala Seksi Pelayanan .....	40
j. Kepala Dusun .....	40
B. Hasil dan Pembahasan .....	41
1. Pendekatan Sumber .....	41
a. Landasan hukum yang berlaku.....	41
b. Anggaran .....	42
c. Sumber Daya Manusia (SDM).....	45
d. Sarana dan Prasarana.....	48
2. Pendekatan Proses .....	51
a. Perencanaan.....	52
b. Pelaksanaan .....	59
c. Pengawasan .....	70
d. Pertanggung Jawaban.....	73
3. Pendekatan Sasaran .....	76

a. Realisasi APBDesa Bidang Pemerintahan Desa .....	76
b. Realisasi APBDesa Bidang Pembangunan Desa .....	78
c. Realisasi APBDesa Bidang Pemberdayaan Masyarakat .....	80
d. Bukti Fisik Pemanfaatan APBDesa.....	83
C. Rekapitulasi Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Putak Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 .....	88
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	93
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
 <b>LAMPIRAN .....</b>	<b>97</b>

## DAFTAR TABEL

### Tabel

1.	Tabel 1 APBDesa dan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pemerintah Desa Putak Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim tahun Anggaran 2015 .....	6
2.	Tabel 2 Kesesuaian Belanja Modal antara APBDesa dan Realisasi APBDesa Putak Tahun 2015 .....	7
3.	Tabel 3 Fokus Penelitian .....	23
4.	Tabel 4 Distribusi Penduduk Desa Putak Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	29
5.	Tabel 5 Distribusi Penduduk Desa Putak Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	30
6.	Tabel 6 Sumber Daya Manusia dalam Pemerintahan Desa Putak .....	46
7.	Tabel 7 Sarana dan Prasarana Penunjang Pengelolaan APBDesa Putak Tahun 2015 .....	49
8.	Tabel 8 Kesesuaian antara RKPDesa Putak Tahun 2015 dengan APBDesa Putak Tahun 2015.....	54
9.	Tabel 9 Pelaksanaan Kegiatan dan Program Kerja APBDesa sesuai Tahapan Pencairan Anggaran .....	61
10.	Tabel 10 Kesesuaian antara Perencanaan dan Realisasi APBDesa Bidang Pemerintahan Desa .....	77
11.	Tabel 11 Kesesuaian antara Perencanaan dan Realisasi APBDesa Bidang Pembangunan Desa .....	79
12.	Tabel 12 Kesesuaian antara Perencanaan dan Realisasi APBDesa Bidang Pemberdayaan Masyarakat.....	81
13.	Daftar Aset Desa Putak tahun 2015 .....	84
14.	Tabel 13 Ketidaksesuaian Pembelian Beberapa Barang antara APBDesa, Realisasi APBDesa dan Laporan Aset Desa Putak Tahun 2015 .....	85
15.	Tabel 14 Rekapitulasi Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Putak Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim .....	88

## DAFTAR GAMBAR

### Gambar

1.	Gambar 1 Bagan Kerangka Pemikiran.....	21
2.	Gambar 2 Peta Wilayah Desa Putak .....	28
3.	Gambar 3 Peta Wilayah Desa Putak dilihat dari Satelit.....	28
4.	Gambar 4 Peta Wilayah Desa Putak yang di Tempati Oleh Penduduk dilihat dari Satelit .....	29
5.	Gambar 5 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Putak Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim .....	32
6.	Gambar 6 Jajaran Perangkat Desa Putak .....	48
7.	Gambar 7 Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Pendamping Desa dan Babinsa Desa Putak.....	48
8.	Gambar 8 Rumah Kepala Desa dan Kendaraan Dinas Pemerintah Desa Putak sebagai Sarana dan Prasarana Penunjang Pengelolaan APBDesa Putak .....	50
9.	Gambar 9 Laptop dan Printer Milik Pemerintah Desa Putak Sebagai Sarana Penunjang Pengelolaan APBDesa Putak .....	50
10.	Gambar 10 Printer Milik Desa Putak yang mengalami Kerusakan .....	51
11.	Gambar 11 Tenda Besi Milik Pemerintah Desa Putak yang mengalami Kerusakan ..	51
12.	Gambar 12 Kegiatan Rapat Penyusunan RAPBDesa Putak Tahun 2015 .....	52
13.	Gambar 13 Alur Penyusunan APBDesa .....	53
14.	Gambar 14 Penyerahan Gaji Pokok dan Tunjangan untuk Aparatur Pemerintah Desa Putak.....	63
15.	Gambar 15 Pembelian beberapa Alat Tulis Kantor oleh Pemerintah Desa Putak .....	64
16.	Gambar 16 Pelaksanaan Pembangunan Jalan Cor Beton.....	65
17.	Gambar 17 Hasil Pelaksanaan Pembangunan Jalan Cor Beton .....	65
18.	Gambar 18 Kursi Plastik yang dibeli Menggunakan APBDesa.....	66
19.	Gambar 19 Pengadaan Rempel Meja Prasmanan .....	67
20.	Gambar 20 Pelaksanaan Kegiatan PKK Desa.....	67
21.	Gambar 21 Pelaksanaan Kegiatan PKK Kecamatan.....	68
22.	Gambar 22 Pelaksanaan Kegiatan LPMD.....	68
23.	Gambar 23 Pengawasan Pembangunan Jalan Cor Beton Desa Putak oleh Tim Pengawas APBDesa Kecamatan .....	72
24.	Gambar 24 Pengawasan dan Pengukuran Jalan Cor Beton Desa Putak oleh Tim Pengawas APBDesa Kecamatan .....	72
25.	Gambar 25 Tenda Besi dan Terpal Tenda Milik Pemerintah Desa Putak .....	87
26.	Gambar 26 Peralatan Prasmanan Milik Desa Putak .....	87
27.	Gambar 27 Mesin Cabut Bulu Ayam.....	87



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Surat Keputusan Pembimbing Skripsi.....	97
2. Lampiran 2 Kartu Bimbingan Skripsi.....	98
3. Lampiran 3 Pedoman Wawancara .....	105
4. Lampiran 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....	107
5. Lampiran 5 Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2015.....	112
6. Lampiran 6 Peraturan Desa Putak Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Putak Tahun 2015 .....	124
7. Lampiran 7 Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Pemerintah Desa Putak Tahun 2015 .....	143

## DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

ADD	= Alokasi Dana Desa
APBD	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDesa	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBN	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ATK	= Alat Tulis Kantor
BUMDes	= Badan Usaha Milik Desa
BPD	= Badan Permusyawaratan Desa
DD	= Dana Desa
KADES	= Kepala Desa
KASI	= Kepala Seksi
KAUR	= Kepala Urusan
MUSRENBANGDes	= Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
PADesa	= Pendapatan Asli Desa
PKK	= Program Kesejahteraan Keluarga
PERMENDAGRI	= Peraturan Menteri Dalam Negeri
RAPBDesa	= Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
RAPBN	= Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RKP	= Rencana Kerja Pemerintah
RPJMDes	= Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
SEKDES	= Sekretaris Desa
UU	= Undang-Undang

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa merupakan kesatuan masyarakat dalam lingkup suatu wilayah tertentu yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada diwilayah suatu kabupaten atau kota.

Setiap desa berfungsi sebagai ujung tombak didalam melaksanakan pembangunan dibidang pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan dan tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Pada dasarnya, setiap desa memiliki kewenangan sendiri yang didasarkan atas otonomi daerah yang dimiliki setiap Kabupaten/Kota. Otonomi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota selanjutnya diteruskan ke Desa dalam rangka mewujudkan sistem desentralisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah kepada Kabupaten/Kota didasarkan atas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan dari otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, yaitu : 1) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerah kekuasaannya, 2) untuk meningkatkan pelayanan umum didaerah kekuasaannya dan 3) untuk meningkatkan daya saing daerah.

Berdasarkan asas desentralisasi yang mengisyaratkan penerapan otonomi daerah, membuat tidak hanya daerah Kabupaten/Kota maupun Provinsi yang dapat mengurus

daerahnya sendiri, melainkan berdampak pada desa yang juga mempunyai kewenangan yang sama. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan hadirnya otonomi daerah yang merujuk pula pada otonomi desa, demi menjadikan desa sebagai wilayah yang mandiri dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri serta menjadi garda terdepan dalam pemberian pelayanan terbaik kepada masyarakat secara langsung, peran pemerintah desa menjadi sangat penting. Hal ini karena, sukses atau tidaknya pelaksanaan dan pengaplikasian dari otonomi desa tersebut akan tergantung dari pemerintah desa dalam menjalankan peran, fungsi dan wewenangnya.

Mengingat begitu pentingnya peran, fungsi serta wewenang dari pemerintah desa dalam membangun Indonesia kedepannya, maka tak salah jika pemerintah pusat membuat program khusus untuk desa dan menggelontorkan banyak anggaran demi suksesnya pelaksanaan otonomi desa. Pemerintah Pusat melalui Program Nawacita menjadikan desa dan daerah pinggiran sebagai salah satu prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan kegiatan yang harus dilaksanakan.

Demi terwujud dan terlaksananya program Nawacita “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah, memberikan pembiayaan-pembiayaan kepada masing-masing desa. Pembiayaan-pembiayaan tersebut digunakan sepenuhnya untuk pelaksanaan program dan kegiatan desa demi terwujudnya pelaksanaan otonomi desa yang baik.



Pembiayaan-pembiayaan yang diterima oleh pemerintah desa tersebut selanjutnya disebut dengan keuangan desa, dimana menurut UU No 6 tahun 2014 tentang desa, Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Terdapat beberapa sumber pendapatan yang diterima oleh pemerintah desa yang masuk ke kas desa dan selanjutnya akan menjadi keuangan desa yang dapat digunakan untuk mengelola dan melakukan pembiayaan program dan kegiatan yang dilakukan di desa. Menurut Permendagri No 113 tahun 2014 tentang Keuangan Desa, sumber-sumber pendapatan desa yang sah terdiri dari, 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa) meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah, 2) Transfer meliputi Dana Desa, bagian hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan retribusi daerah, Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan dari APBD Provinsi, dan bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota, 3) Pendapatan lainnya meliputi hibah dan/atau sumbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Sumber-sumber pendapatan desa yang telah diterima oleh desa selanjutnya akan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) setiap tahunnya yang kemudian akan menjadi peraturan desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, APBDesa berisikan beberapa unsur didalamnya, seperti pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. APBDesa yang telah disetujui selanjutnya akan menjadi peraturan desa dan diserahkan ke Bupati melalui Camat. Besaran anggaran yang diterima dalam APBDesa setiap desa di Indonesia

tentunya berbeda, hal ini karena tergantung pada beberapa poin dan/atau aspek pendapatan desa yang dimiliki setiap desa. Jumlah besaran pendapatan dalam APBDesa setiap desa berbeda-beda setiap desanya, yang membuat pembuatan APBDesa akan tergantung dari pendapatan yang diterima oleh desa tersebut.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia, dimana provinsi ini merupakan daerah otonom yang telah menggunakan wewenangnya untuk bisa mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 17 Kabupaten/Kota yang mana setiap Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan telah menerapkan asas desentralisasi yang merujuk pada otonomi daerah. Selain wilayah Kabupaten/Kota, Provinsi Sumatera Selatan juga ikut serta dalam pelaksanaan otonomi daerah di wilayah pedesaan.

Dapat diketahui bahwa Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 2.859 desa yang tersebar kedalam 14 Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ikut serta dalam pelaksanaan otonomi desa, dimana Provinsi Sumatera Selatan memberikan bantuan-bantuan baik bantuan secara langsung kedesa atau melalui Kabupaten/Kota.

Salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Selatan adalah Kabupaten Muara Enim. Kabupaten Muara Enim adalah salah satu daerah otonom yang telah melaksanakan dan menjalankan prinsip-prinsip otonomi daerah dan berperan aktif dalam membantu desa, dimana pemerintah Kabupaten Muara Enim berusaha mengoptimalkan peran serta jajaran aparatur pemerintahan desa dalam lingkup Kabupaten Muara Enim untuk melaksanakan peran pentingnya dalam menjalankan dan mengelola potensi desa yang ada dimasing-masing desa di wilayah Kabupaten Muara Enim.

Wilayah Kabupaten Muara Enim terdiri dari 245 Desa yang termaktub dalam 20 Kecamatan. Adapun Kecamatan-Kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten

Muara Enim antara lain, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Rambang Dangku, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Ujanmas, Kecamatan Lubai, Kecamatan Rambang, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Lembak, Kecamatan Benakat, Kecamatan Kelekar, Kecamatan Muara Belida, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Belida Darat, dan Kecamatan Lubai Ulu.

Kecamatan Gelumbang adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Muara Enim dan berada jauh dari pusat Ibukota Kabupaten. Kecamatan Gelumbang terdiri dari 22 Desa yang telah menerima pembiayaan-pembiayaan untuk melaksanakan otonomi desa. Salah satu desa di lingkup Kecamatan Gelumbang yang mendapatkan dan menjalankan otonomi desa tersebut adalah Desa Putak.

Berdasarkan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 26 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2015, Desa Putak merupakan Desa yang mendapatkan anggaran Dana Desa Tertinggi kedua di Kecamatan Gelumbang setelah Desa Suka Menang. Sehingga dengan pembiayaan yang lebih tinggi dari desa-desa yang lain tersebut diharapkan Pemerintah Desa Putak dapat mengelola dan merealisasikan anggaran yang didapat untuk membangun desa, pemanfaatan potensi desa dan pelayanan masyarakat.

Berikut adalah tabel tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pemerintah Desa Putak tahun anggaran 2015, yang terdapat dalam Peraturan Desa Putak Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim nomor 01 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2015.

**Tabel 1 APBDesa dan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pemerintah Desa Putak  
Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2015.**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran		Jumlah Realisasi
1	<b>Pendapatan</b>			
1 1	Pendapatan Asli Desa	Rp	1.000.000	1.000.000
1 2	Pendapatan Transfer			
1 2 1	Dana Desa (DD) APBN 2015	Rp	278.071.885	278.050.000
1 2 2	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp	385.261.807,89	385.260.000
1 2 3	Bantuan Kabupaten	Rp	180.600.000	180.600.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	Rp	<b>844.933.629,89</b>	<b>844.910.000</b>
2	<b>Belanja</b>			
2 1	Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	180.600.000	180.600.000
2 2	Operasional Perkantoran			
2 2 1	Belanja Barang dan Jasa	Rp	65.184.000	65.184.000
2 2 2	Belanja Modal	Rp	22.500.000	22.500.000
2 3	Operasional BPD	Rp	28.894.000	28.894.000
2 4	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	358.373.000	358.373.000
2 5	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
2 5 1	Belanja Barang dan Jasa	Rp	50.309.000	50.309.000
2 5 2	PKK	Rp	59.500.000	59.500.000
2 5 3	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	39.000.000	39.000.000
2 5 4	Karang Taruna	Rp	13.000.000	13.000.000
2 5 5	Kelompok Usaha Ternak	Rp	27.550.000	27.550.000
	<b>Jumlah Belanja</b>	Rp	<b>844.910.000</b>	<b>844.910.000</b>
3	<b>Surplus/Defisit</b>	Rp	<b>23.692,89</b>	<b>0</b>
3 1	Pembiayaan			
3 1 1	Silpa	Rp	23.692	0
3 2	Pengeluaran Pembiayaan			

*Sumber :Diadopsi dari Peraturan Desa Putak Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Nomor 1 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2015*

Dari tabel 1 diatas, dapat kita lihat bahwa Desa Putak Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim pada tahun 2015 mendapatkan pendapatan desa sebesar Rp 844.933.692,89 yang telah termuat dalam APBDesa. Pada dasarnya anggaran pendapatan yang telah diterima setiap pemerintah desa harus digunakan untuk pembangunan desa, penuntasan kemiskinan, pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan kegiatan desa.

Namun berbeda dengan kenyataan yang terjadi, dengan begitu besarnya anggaran yang didapatkan, Pemerintah Desa Putak masih belum bisa mengelola anggaran sesuai dengan tujuan dari pengelolaan APBDesa. Hal ini mengakibatkan masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di Desa Putak seperti belum adanya kantor desa sebagai pusat



pelayanan masyarakat desa yang seyogyanya dimiliki setiap instansi pemerintahan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, hal ini mengakibatkan pelayanan masyarakat dilakukan di rumah pribadi milik pemerintah desa.

**Tabel 2 Kesesuaian Belanja Modal Antara APBDesa dan Realisasi APBDesa Putak Tahun 2015**

No.	Perencanaan Belanja Modal dan/ atau Aset Desa dalam APBDesa Pemerintah Desa Putak Tahun 2015	Realisasi Belanja Modal dan/ atau Aset Desa dalam APBDesa Pemerintah Desa Putak Tahun 2015
1	Laptop	Terdapat pada Laporan Realisasi APBDesa dan ada bukti fisik barang
2	Printer	Terdapat pada Laporan Realisasi APBDesa dan ada bukti fisik barang
3	Tenda Besi ukuran 6x6 meter	Terdapat pada Laporan Realisasi APBDesa dan ada bukti fisik barang
4	Mesin Cabut Bulu Ayam	Terdapat pada Laporan Realisasi APBDesa dan ada bukti fisik barang
5	Mesin Parut Kelapa	Terdapat pada Laporan Realisasi APBDesa dan ada bukti fisik barang
6	Mesin Bumbu	Terdapat pada Laporan Realisasi APBDesa dan ada bukti fisik barang
7	Termos Nasi	Terdapat pada Laporan Realisasi APBDesa dan ada bukti fisik barang
8	Mesin Genset	Terdapat pada Laporan Realisasi APBDesa dan ada bukti fisik barang
9	Alat Marawis	Terdapat pada Laporan Realisasi APBDesa dan ada bukti fisik barang
10	Aksesoris Meja Prasmanan	Terdapat pada Laporan Realisasi APBDesa dan ada bukti fisik barang
11	Sound System	Terdapat pada Laporan Realisasi APBDesa dan ada bukti fisik barang
12	Kursi Plastik	Terdapat pada Laporan Realisasi APBDesa dan ada bukti fisik barang
13	Mesin Potong Rumput	Terdapat pada Laporan Realisasi APBDesa dan ada bukti fisik barang
14	Peralatan Prasmanan	Terdapat pada Laporan Realisasi APBDesa dan ada bukti fisik barang
15	Aksesoris Tenda	Terdapat pada Laporan Realisasi APBDesa namun tidak ada bukti fisik barang
16	Buku Bacaan Anak	Terdapat pada Laporan Realisasi APBDesa namun tidak ada bukti fisik barang
17	Lemari Perpustakaan	Terdapat pada Laporan Realisasi APBDesa namun tidak ada bukti fisik barang
18	Piring Prasmanan	Terdapat pada Laporan Realisasi APBDesa namun tidak ada bukti fisik barang
19	Kamera Digital	Terdapat pada Laporan Realisasi APBDesa namun tidak ada bukti fisik barang
20	Wireless	Terdapat pada Laporan Realisasi APBDesa namun tidak ada bukti fisik barang

Sumber : Hasil Observasi Awal Penelitian

Dari tabel 2 diatas, dapat diketahui bahwa terdapat barang-barang yang direncanakan dan direalisasikan melalui APBDesa Putak tahun 2015, namun dari beberapa barang tersebut terdapat barang yang hanya berupa rencana dan laporan namun tidak ada bukti fisik barang. Beberapa barang yang dimaksud antara lain aksesoris tenda, buku bacaan anak, lemari perpustakaan, piring prasmanan, kamera digital dan wireless. Beberapa barang tersebut hanya ada pada perencanaan APBDesa dan Laporan Realisasi namun tidak memiliki bukti fisik barang, hal ini membuat inventaris dan/ atau aset desa tersebut menjadi tidak jelas.

Selain itu juga, APBDesa Putak Tahun 2015 untuk bidang pemberdayaan masyarakat hanya terfokus pada belanja modal tanpa memuat program kerja tentang sosialisasi dan/ atau pelatihan keterampilan masyarakat seperti keterampilan menjahit, merajut, pemanfaatan bahan organik atau pun non organik, pengelolaan limbah pertanian dan pelatihan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Padahal berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang keuangan desa bahwa bidang pemberdayaan masyarakat desa terdiri dari belanja modal dan jasa serta pelatihan-pelatihan, sosialisasi ataupun program-program kerja pemberdayaan masyarakat lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat desa.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi mengidentifikasi bahwa pengelolaan APBDesa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Putak masih kurang maksimal, hal ini membuat masih banyaknya permasalahan masyarakat yang kurang bisa terselesaikan. Seharusnya dengan anggaran yang telah didapat, pemerintah Desa Putak dapat mengelola anggaran dengan baik dan dapat memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini akan dibahas tentang **“Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Putak Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Tahun 2015”**. Dengan penelitian ini, diharapkan

agar dapat membantu pembaca mengetahui Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Putak Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim tahun 2015 dan semoga dapat membantu masyarakat Desa Putak agar dapat turut serta dalam pengawasan pelaksanaan atau realisasi APBDesa di Desa Putak Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, agar kedepannya pengelolaan APBDesa ini dapat sesuai dengan tujuan dari adanya APBDesa tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Putak Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim tahun 2015 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Putak Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim tahun 2015.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat terkait dengan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Putak Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Berikut beberapa manfaat yang dihasilkan dalam penelitian ini :

### **1. Manfaat Teoritis**

Temuan-temuan yang terdapat dalam penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan kajian yang bermanfaat bagi Ilmu Administrasi Negara khususnya bidang Administrasi Keuangan Publik, dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan menjadi bahan referensi bagi peneliti dan pihak lain yang membutuhkannya;

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pemerintah, baik pemerintah desa maupun pemerintah daerah khususnya untuk pemerintah dalam lingkup Kabupaten Muara Enim dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

## Daftar Pustaka

### Buku :

- Bungin, M. Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana
- Hariadi, Pramono. dkk. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Lubis, S.B. Hari dan Martani Huseini. 2016. *Organisasi*. Tangerang: Universitas Terbuka
- Renyowijoyo, Muindro. 2010. *Akuntansi Sektor Publik : Organisasi Non Laba, Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Siagian, Sondang P. 2012. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung : Fokus Media
- Steers, M. Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sule, Erine Trisnawati dan Kurniawan Saefullah. 2012. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Kencana
- Suparmoko, M. 2012. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta : BPFE
- Suprihanto, John. 2014. *Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Widjaja, HAW. 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara  
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa

Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan  
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Muara Enim

Peraturan Desa Putak Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2015  
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2015

### **Jurnal**

Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa dari Badan Pengawas Keuangan dan  
Pembangunan (BPKP)  
<http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklakbimkonkeudes.pdf>

### **Internet** :

BPK. "Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa". 12 September 2016  
<http://palembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/12/No-020-Pedoman-Pelaksanaan-Alokasi-Dana-Desa-1.pdf><https://core.ac.uk/download/files/379/11723213.pdf>

<http://m.rmolsumsel.com/news.php?id=40428> diakses pada 15 Agustus 2017